

## Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance

Asri Usman <sup>1</sup> ✉, Mediaty <sup>2</sup>, Ainun Khafifah <sup>3</sup>, Muhammad Awal Ramadhan <sup>4</sup>,  
Wayan Adhenuari Gandhi Putra Randayo <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

### Abstrak

Undang-undang telah mengalami banyak modifikasi karena berusaha menuju kesempurnaan. Banyak pejabat publik masih berjuang untuk menyesuaikan pola pikir mereka dan menempatkan kebutuhan publik di atas kepentingan mereka sendiri atau kelompok lain. Hal ini disebabkan akibat hukum yang masih diterapkan kepada para koruptor masih abu-abu tua yang artinya masih lengah dan tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Pejabat publik di Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Munculnya Daerah Otonomi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah dalam upaya memajukan kesejahteraan. Metodologi penelitian berupa studi kepustakaan (Library Research) mendefinisikan kepustakaan atau Studi pustaka merupakan serangkaian tugas yang meliputi membaca dan mencatat, menganalisis bahan penelitian, dan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Dengan demikian, bangkitnya pengelolaan keuangan, atau tata kelola keuangan yang kuat, dan berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom menuju pemerintahan yang baik (good governance). Pemimpin yang dapat dipercaya, tidak memihak, berintegritas, dan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan lainnya diperlukan untuk pemerintahan yang baik. Kualitas berikut ini diperlukan untuk manajemen atau tata kelola keuangan yang efektif: akuntabilitas, keterlibatan, ketaatan pada hukum, keterbukaan, daya tanggap, fokus pada konsensus, keadilan dan pemerataan, serta efektivitas dan efisiensi. Reformasi anggaran, kelembagaan, sistem informasi akuntansi, audit, dan manajemen semuanya diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

**Kata Kunci:** *Akuntansi Manajemen; Pengambilan Keputusan; Good Governance*

### Abstract

The law has undergone many modifications as it strives towards perfection. Many public officials are still struggling to adjust their mindset and put the needs of the public above their own or those of other groups. This is due to the consequence that the law that is still being applied to corruptors is still dark gray, which means they are still careless and do not provide a deterrent effect for corruptors. Public officials in Indonesia have issued Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government: The Emergence of Autonomous Regions and Law Number 25 of 1999 concerning Balancing Central and Regional Finances in an effort to promote prosperity. The research methodology in the form of library research (Library Research) defines literature or literature study as a series of tasks which include reading and recording, analyzing research materials, and using library data collection methods. Thus, the emergence of financial management, or strong financial governance, and the development of autonomous regional

administration towards good governance. Leaders who are trustworthy, impartial, with integrity, and put the public interest ahead of their own and other interests are necessary for good governance. The following qualities are necessary for effective financial management or governance: accountability, involvement, adherence to law, openness, responsiveness, focus on consensus, fairness and equity, and effectiveness and efficiency. Budgetary, institutional, accounting information systems, auditing, and management reforms are all needed to make this happen.

**Keywords:** *Management Accounting; Decision Making; Good Governance*

Copyright (c) 2022 Asri Usman

✉ Corresponding author :

Email Address : [asriusman@unhas.ac.id](mailto:asriusman@unhas.ac.id)

## PENDAHULUAN

Korporasi adalah bisnis yang terlibat dalam berbagai operasi dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas. Bisnis membutuhkan banyak informasi untuk mencapai tujuan ini. Pemimpin harus mempertimbangkan semua opsi pilihan yang tersedia sebelum memilih tindakan yang paling efektif dan efisien untuk bisnis. Dengan kata lain, pilihan yang dibuat akan menghasilkan keuntungan terbesar atau kerugian terkecil (Dewi et al., 2021).

Manajemen sebagai pengambil keputusan membutuhkan berbagai macam informasi sebagai landasan pertimbangan yang sesuai dengan jenis pilihan yang diambil untuk sampai pada pilihan yang terbaik (Astuty & Pasaribu, 2021). Oleh karena itu, bisnis harus merencanakan tindakannya sebelum melaksanakannya untuk memungkinkan manajemen membuat penilaian yang benar dan terkini. Untuk membantu manajemen membuat keputusan yang masuk akal untuk bisnis dan masalah yang dihadapi, akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi dari data akuntansi (Dewi et al., 2021). Manajer mungkin memerlukan informasi non-keuangan serta informasi keuangan saat membuat pilihan. Sistem akuntansi dapat digunakan untuk memperoleh data yang bersifat keuangan. metode akuntansi Ini akan memudahkan untuk memilih cara mengumpulkan data, meringkasnya, mengkategorikannya, menganalisisnya dan menginformasikan manajemen perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan (Durana et al., 2021).

Seorang manajer akan dapat mengelola bisnis dan mengatasi masalah yang muncul dengan menggunakan pengetahuan tersebut. Akuntansi manajemen sangat penting dalam proses memahami bagaimana kemajuan kinerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan (Coccia, 2021). Kinerja jangka pendek tercakup dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP), sedangkan kinerja jangka panjang tercakup dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) (Hartanto et al., 2021). Jika kinerja belum tercapai, strategi yang dimiliki manajemen mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kinerja tersebut (Mansoor, 2021). Hasil kinerja perusahaan dapat dievaluasi dan diukur dengan memahami kemajuan kinerja yang telah disusun. Untuk mengawasi operasinya dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul, manajemen harus membuat pilihan yang tepat (Morgan & Patomäki, 2021).

Data dan informasi yang disediakan untuk tujuan akuntansi dikategorikan, dicatat, diperiksa, ditafsirkan, dan diringkas untuk pihak yang terlibat dan pihak yang

berkepentingan. Pengambilan keputusan berdasarkan data akuntansi yang lengkap dan akurat dapat membantu pencapaian tujuan program perusahaan atau pemerintah, seperti laba tahunan yang tinggi atau tinggi yang memuaskan pelayanan masyarakat dengan menambah nilai atau menurunkan berbagai jenis biaya, khususnya biaya sosial yang sering diabaikan secara konvensional. akuntansi. (Lihat Yakhou dan Dorweiler, 2004, Media Accounting, 2004, dan Sambodo, 2003).

Akuntansi lingkungan mempromosikan efisiensi ekologis yang meningkatkan kinerja perusahaan dan lembaga di sektor swasta dan publik. Hanya dengan membantu upaya pelestarian lingkungan, keberlanjutan dan kesuksesan ekonomi dapat dicapai secara maksimal. baik penerimaan lingkungan maupun semua perhitungan dan pengeluaran yang secara transparan dicatat dalam akuntansi lingkungan sebagai bagian dari langkah akuntabilitas publik untuk meningkatkan tata kelola.

Terutama di negara-negara berkembang telah berkembang menjadi alat yang signifikan bagi pebisnis, pejabat pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat. Pengambilan keputusan dalam berbagai kelompok komersial, pemerintah, dan sosial didasarkan pada data dan informasi yang dijanjikan (Syairozi et al., 2021). Pengambilan keputusan untuk pengurangan biaya, peningkatan lingkungan, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan hal lainnya.

Aspek kunci dari sistem akuntansi manajemen adalah bahwa pilihan dibuat secara internal, menggunakan data keuangan dan non-keuangan, yang bisa berubah-ubah. Ada juga fokus ke masa depan, dan yang terpenting, akuntansi manajemen tidak akan diatur oleh peraturan seperti SAK. Keuangan yang menekankan pada pemangku kepentingan eksternal perusahaan, termasuk pemiliknya, kreditur, investor, pemerintah, bank, staf, dan masyarakat lainnya. Akuntansi keuangan diatur oleh peraturan seperti SAK, dan data keuangan yang diberikan tidak memihak dan didasarkan pada fakta sebelumnya.

Pada penelitian Jaminta Sinaga yang berjudul Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance di Indonesia. Terdapat hasil menunjukkan bahwa Suatu bangsa dinilai baik jika para pemimpinnya memiliki kesadaran dan aktif membina masyarakat madani. tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dari segi politik, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang handal. Untuk mencapai hal ini Reformasi di bidang anggaran, institusi, sistem informasi akuntansi, audit, dan manajemen semuanya diperlukan (Wahyuni-TD et al., 2021). Undang-undang tersebut telah mengalami banyak modifikasi karena berusaha untuk kesempurnaan. Banyak pejabat publik masih berjuang untuk mengubah pola pikir mereka dan menempatkan kebutuhan publik di atas kepentingan mereka sendiri atau kelompok lain.

### **Akuntansi Manajemen**

Akuntansi manajemen seringkali disebut sebagai akuntansi manajerial dan dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi keuangan dan sumber daya untuk digunakan oleh tim internal organisasi dalam pengambilan keputusan (Durana et al., 2021). Dalam prosesnya, informasi dan laporan keuangan seperti faktur dan neraca keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan guna mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat, mengendalikan perusahaan, serta mengembangkan bisnis ke jalur yang sesuai (falih Chichan &

Alabdullah, 2021). Berbeda dengan akuntansi keuangan yang mengumpulkan data akuntansi untuk membuat laporan keuangan, akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk mengetahui kualitas suatu bisnis berdasarkan metrik operasionalnya guna membuat rencana bisnis terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian (Alabdullah et al., 2021).

Akuntansi Manajemen yaitu untuk membantu manajemen membuat rencana untuk tujuan ekonomi yang logis dan membuat keputusan, akuntansi manajemen adalah penerapan prosedur dan konsep yang relevan dalam memproses data ekonomi historis dan yang dapat diproyeksikan dari unit perusahaan (Fakhimuddin et al., 2021). logis untuk mencapai tujuan. Akuntansi manajemen adalah jenis akuntansi manajemen yang menghasilkan informasi keuangan yang banyak digunakan oleh pengguna internal perusahaan. Manajemen akuntansi diperlukan untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan proses manajemen (falih Chichan & Alabdullah, 2021).

Proses akuntansi manajemen organisasi berusaha untuk memberikan manajer informasi untuk kontrol, koordinasi, dan perencanaan. Adapun beberapa macam akuntansi manajemen yaitu :

1. Kontrol adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk membujuk agen agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan dari bagian organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Data akuntansi digunakan sebagai alat komunikasi, inspirasi, penarik perhatian, dan penilaian dalam proses pengendalian.
2. Organisasi. Sebuah proses yang disebut koordinasi mencoba membawa upaya dari berbagai konstituen organisasi untuk mencapai tujuan.
3. Pengorganisasian. Perencanaan adalah proses membuat keputusan tentang tindakan masa depan. Dimungkinkan untuk membuat perencanaan ruang lingkup untuk masing-masing unit organisasi atau seluruh organisasi.

Peran manajemen mengacu pada jenis perilaku manajemen. Seorang manajer adalah seseorang yang mengawasi pengelolaan sumber daya, termasuk orang, waktu, peralatan, dan data keuangan. Jadi kinerja seorang manajer dievaluasi dari seberapa berhasil dia menangani sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (Lisa, 2021). Semakin baik mereka dianggap sebagai dirinya sendiri, semakin rapi, terorganisir, dan indah apa yang mereka tangani. Sebagai seorang manajer, ia harus melakukan tugasnya secara etis (Alabdullah et al., 2021).

Seorang pemimpin adalah seseorang yang berkontribusi pada tim, komunitas, atau organisasi mereka. Itu dievaluasi oleh gerakan yang ditimbulkannya di antara mereka yang mematuhi atau terhubung dengannya (Astuty & Pasaribu, 2021). Itu juga dievaluasi berdasarkan perubahan yang dia alami dan kegigihan usahanya. Seorang pemimpin tidak harus selalu rapi, teratur, atau menarik dalam kegiatan mengelola suatu organisasi (Dewi et al., 2021). Tetapi yang paling penting adalah dia bertindak secara moral dan untuk kepentingan masyarakat (Durana et al., 2021).

### **Pengambilan Keputusan**

Membuat pilihan dari antara pilihan yang tersedia dan mengakhiri proses mental mengenai masalah atau masalah yang dihadapi adalah hasil dari pemecahan masalah, menjawab pertanyaan sebagai hukum keadaan, dan pemecahan masalah. Suatu keputusan dibuat sehubungan dengan hasil-hasilnya (Abdel-Basset et al., 2021). Membuat keputusan adalah salah satu aspek kepemimpinan yang paling penting, dan

seorang pemimpin akan menghabiskan banyak waktu, perhatian, dan ide mereka untuk mempertimbangkan bagaimana membuat keputusan (Awan et al., 2021). Semakin bertanggung jawab seseorang di dalam bisnis, semakin penting membuat keputusan. Gaya kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan sikap staf (Fischer et al., 2021).

Proses pengambilan keputusan memiliki satu tujuan, yang terjadi ketika pilihan yang dibuat hanya mempengaruhi satu masalah (Fischer et al., 2021). Sifat ganda tujuan terjadi ketika keputusan yang dihasilkan mempengaruhi lebih dari satu masalah, yang berarti bahwa keputusan yang diambil secara bersamaan menyelesaikan dua atau lebih masalah, baik yang kontradiktif maupun tidak kontradiktif (Gangopadhyay et al., 2021). Ini juga berarti bahwa setelah keputusan dibuat, itu tidak akan mempengaruhi masalah lain.

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Gangopadhyay et al., 2021). Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian (Kasy & Abebe, 2021). Dalam proses pengambilan keputusan bisa jadi berupa rasional atau irasional. Proses pengambilan keputusan adalah proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan pembuat keputusan (Abdel-Basset et al., 2021). Dalam proses memutuskan tentang sesuatu yang penting dapat dilakukan baik itu individu, sekelompok orang atau dalam suatu organisasi (Mishra et al., 2021).

Setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda. Keputusan biasanya memiliki empat tingkatan yaitu keputusan otomatis, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan, keputusan yang berdasarkan pertimbangan, serta keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Contohnya seorang pengemudi mobil memperoleh informasi di perempatan jalan berupa lampu merah, secara langsung seorang pengemudi tersebut membuat keputusan otomatis untuk berhenti (Fischer et al., 2021). Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan merupakan tingkatan keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks, artinya informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Akan tetapi keputusan belum dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan (Tang & Liao, 2021).

Contohnya seseorang yang akan membeli arloji akan membandingkan antara beberapa merek. Ia membandingkan harganya, kualitasnya serta modelnya dan untuk mengambil keputusan mungkin ia akan memerlukan waktu beberapa jam bahkan beberapa hari sebelum menjatuhkan keputusan. Keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda, merupakan tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin banyak selain itu, dalam informasi yang sudah ada terdapat ketidakpastian. Keputusan semacam ini lebih banyak mengandung risiko dan terdapat keraguan dalam pengambilan keputusannya.

## Good Governance

Pelayanan publik yang efektif, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan pemerintahan yang akuntabel kepada rakyat merupakan contoh tata pemerintahan yang baik (Nguyen et al., 2021). Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga sinergi interaksi positif antara negara, swasta, dan masyarakat. Agar pemerintah dapat memenuhi ambisi konstituenya dan mewujudkan tujuan negara dan negara, pemerintahan yang efektif, atau kepercayaan, adalah suatu persyaratan (Sawmar & Mohammed, 2021). Berbagai prakarsa ke arah itu telah dilakukan, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Keran. MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Sawmar & Mohammed, 2021). Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Nguyen et al., 2021). Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Morgan & Patomäki, 2021).

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru (Wahyuni-TD et al., 2021). Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya (Yami et al., 2021). Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance (Sawmar & Mohammed, 2021). Partisipasi masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat (Nguyen et al., 2021). Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya (Morgan & Patomäki, 2021). Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan

masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral (Wahyuni-TD et al., 2021).

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan (Yami et al., 2021). Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia (Morgan & Patomäki, 2021).

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru (Nguyen et al., 2021). Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance (Morgan & Patomäki, 2021).

Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan Good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance (Yami et al., 2021).

Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

## METODOLOGI

Menggunakan metodologi penelitian berupa studi kepustakaan. kepustakaan atau studi pustaka sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Banyak buku dapat dipelajari dalam studi literatur. referensi dan temuan yang berguna dari penelitian sebelumnya yang sebanding untuk mendapatkan landasan teori untuk masalah yang diteliti. Tinjauan literatur buku, artikel, catatan, dan item lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi adalah metode lain untuk mengumpulkan data untuk penelitian literatur. Sedangkan penelitian kepustakaan

menurut Sugiyono (2012) adalah penyelidikan teoretis, rujukan, dan kepustakaan ilmiah lainnya yang relevan dengan budaya, nilai, dan norma yang muncul di lingkungan sosial yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntansi Manajemen Sektor Publik**

Menurut berbagai sumber akademik, akuntansi manajemen adalah bidang khusus akuntansi yang memproses data keuangan hingga pembuatan laporan keuangan dan laporan lain yang digunakan oleh manajemen atau pemimpin bisnis untuk membuat pilihan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jika Anda ingat dari perspektif audit, audit akuntansi untuk keuangan bersifat umum karena tujuan audit adalah untuk menilai apakah laporan keuangan yang sebanding disajikan secara wajar atau secara analitik (matched) secara default.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk Dibandingkan dengan melihat laporan keuangan, memantau kinerja, dalam hal ini kemanjuran dan efisiensi masing-masing unit, dan melihat akuntansi manajemen dilakukan dengan menggunakan frase yang sangat terspesialisasi perusahaan. Akibatnya, audit kinerja adalah istilah umum untuk manajemen inspeksi.

Selain itu, mandat akuntansi manajemen bahwa semua eksekutif memahami pembuatan laporan keuangan, yang merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan. Fokus akuntansi manajemen, bagaimanapun, melampaui hanya pelaporan keuangan dan termasuk analisis serta pengaruh (dampak) dari temuan analisis laporan keuangan pada pengguna, juga dikenal sebagai hasil. Tanggung jawab publik tidak benar.

Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memerangi kejahatan politik termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menghambat keadilan sosial dan kesetaraan. pengesahan UU No. 28 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengumpulkan informasi tentang pemerintah, termasuk, tentu saja, informasi keuangan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mencegah lembaga publik, pejabat publik, atau organisasi publik lainnya mengelola keuangan publik dengan cara yang dapat membahayakan masyarakat.

### **Aspek-Aspek Pengambilan Keputusan dalam Publik**

Membuat pilihan dari antara pilihan yang tersedia dan mengakhiri proses mental mengenai masalah atau masalah yang dihadapi adalah hasil dari pemecahan masalah, menjawab pertanyaan sebagai hukum keadaan, dan pemecahan masalah. Suatu pilihan dibuat sehubungan dengan hasil dari suatu keputusan. Pengambilan keputusan memiliki dua tujuan: berfungsi sebagai landasan bagi semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun kelompok, maupun secara kelembagaan dan organisasi; dan itu berfungsi sebagai kegiatan futuristik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masa depan (efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan, menurut Syamsi (1995: 13): (1) tujuan keputusan, atau mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan; dan (2) identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan diadakannya pemilihan umum, (3) perhitungan yang berkaitan dengan faktor-faktor

yang berada di luar kendali manusia atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya (uncontrollable events), dan (4) metode atau alat yang digunakan untuk menilai atau mengukur hasil keputusan.

Pertama, pemimpin harus mampu menelaah dan mempertimbangkan tujuan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, faktor internal dan eksternal, lembaga/organisasi, serta faktor lain yang relevan serta fasilitas pengambilan keputusan.

Sebuah organisasi dan variabel yang mempengaruhinya terkait erat dalam proses pengambilan keputusan. Diantaranya adalah:

- Jabatan atau pangkat Letak jabatan,  
Sebagai pengambil keputusan, pengambil keputusan, atau staf, dan peningkatan jabatan, sebagai strategis, kebijakan, regulasi, organisasi, atau teknis, keduanya dapat dipertimbangkan dalam konteks pengambilan keputusan.
- Tantangan  
Tujuan dapat terhalang oleh masalah, yaitu penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, diinginkan, atau harus dicapai. Masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur adalah dua kategori di mana kesulitan jatuh.
- Pengaturan  
Situasi adalah jumlah dari semua elemen yang saling berhubungan dalam suatu kondisi yang bersama-sama berdampak pada kita dan mereka yang menginginkan kita.
- Situasi  
Kondisi adalah kumpulan elemen yang, secara kolektif, mempengaruhi kapasitas seseorang, kekuatan gerak, atau keduanya. Banyak dari variabel ini terkait dengan sumber daya.
- Tujuan  
Tujuan yang harus dipenuhi telah diputuskan atau ditetapkan, meliputi tujuan individu, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, dan tujuan bisnis secara umum. Proses pengambilan keputusan telah menghasilkan tujuan atau sasaran antara.

### **Peran akuntansi manajemen sektor Publik**

Aktivitas untuk akuntansi manajemen sektor publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perencanaan dan pengendalian aktivitas. Aktivitas Karena ada tujuan perusahaan yang ingin dicapai seperti yang telah digariskan sebelumnya dalam kegiatan perencanaan, maka perencanaan dan pengendalian merupakan kegiatan yang paling krusial dilakukan karena: Perencanaan tanpa pengendalian tentunya hal-hal yang telah ditentukan dalam perencanaan tidak mungkin tercapai juga. sebagai kegiatan pengendalian. Gambar form menggambarkan proses perencanaan dan pengendalian sebagai berikut:

- Menetapkan maksud dan tujuan mendasar
- persiapan operasional
- Penganggaran
- Pengukuran dan kontrol.
- Umpan balik dan pelaporan analisis.

Menetapkan tujuan dan sasaran dalam perencanaan merupakan tindakan pertama dalam siklus manajemen sektor publik, seperti yang dapat diamati dari langkah-langkah proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan operasional,

atau memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat untuk memenuhi tuntutan masyarakat, datang berikutnya. Ini melibatkan memecah tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola.

Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tetap memperhatikan dana yang sudah dimiliki. Selama proses implementasi yang baik secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali.

Kontrol langsung, atau pengamatan langsung terhadap area, proyek, atau produk jadi (anggaran pembangunan). Setelah tahap pelaksanaan pekerjaan selesai, pelaksana yang bersangkutan menyampaikan laporan yang telah disiapkan sebagai sarana pengawasan tidak langsung.

Langkah terakhir adalah menganalisis bagaimana kegiatan dilakukan dan membandingkan hasilnya dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan selama perencanaan. Temuan analisis digunakan untuk mengevaluasi kinerja serta memberikan umpan balik atau saran untuk meningkatkan semua perencanaan selanjutnya. Kontrol langsung, atau pengamatan langsung terhadap area, proyek, atau produk jadi.

Mardiasmo mengklaim bahwa Akuntansi:

1. Perencanaan strategis, adalah tanggung jawab manajemen akuntansi di perusahaan sektor publik. Dalam melaksanakan kegiatan khususnya pembuatan program yang bervariasi dengan menggunakan sumberdaya dan prioritas yang ada. Agar alokasi dana yang diantisipasi dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, diperlukan informasi manajemen untuk menentukan total biaya program (cost of the program) dan menentukan biaya suatu kegiatan (cost of the activity). Keandalan manajemen sistem informasi akuntansi akan dapat mengurangi kemungkinan pemborosan, kebocoran dana, dan dapat mengidentifikasi program yang tidak layak secara komersial. Informasi tentang manajemen sektor dan akuntansi Saat mengevaluasi tindakan internal untuk meningkatkan jumlah keuntungan yang akan dihasilkan, sektor swasta menginformasikan pihak internal.
2. Informasi Biaya. Ada tiga macam biaya yang dapat diidentifikasi dalam akuntansi sektor publik, yaitu:
  - Pengeluaran input, seperti tenaga kerja dan bahan mentah, lebih penting saat menganggarkan keuangan dan membuat keputusan.
  - Biaya proses, berupa pembagian biaya sesuai dengan tujuan organisasi di sektor publik, antara lain biaya untuk dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, biaya darah daerah.
  - Biaya keluaran, atau harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang ke tangan pelanggan untuk pengguna ini. Yang penting dalam hal ini adalah persepsi optimal layanan dari faktor-faktor berikut: waktu pengiriman, kualitas pengiriman, biaya, lokasi, distribusi, dan metode layanan.
3. Penilaian investasi.  
Penilaian investasi di sektor publik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu investasi serta manfaatnya. Tujuan penilaian investasi adalah untuk mengetahui apakah suatu investasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Dalam melakukan evaluasi, beberapa elemen diperhitungkan, seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko, tidak adanya jaminan, dan sumber pendanaan.

Penilaian investasi di sektor publik jauh lebih menantang daripada di sektor swasta. Selain biaya finansial, biaya sosial juga sangat tinggi, dan manfaat sosial sulit diprediksi karena melibatkan banyak kepentingan publik yang membutuhkan waktu untuk diidentifikasi.

#### 4. Penganggaran

Peran akuntansi manajemen di sektor publik adalah untuk memungkinkan penganggaran yang efektif dan efisien. Penyusunan anggaran melayani sejumlah tujuan atau menawarkan banyak keuntungan, termasuk:

- Sebagai alat perencanaan
- Untuk melakukan kontrol.
- Sebagai instrumen kebijakan.
- Sebagai instrumen politik.
- Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi.
- Sebagai alat penilaian kerja.

#### 5. Menghitung Biaya Layanan.

Sangat menantang untuk menetapkan tarif untuk setiap layanan yang ditawarkan institusi kepada masyarakat umum sebagai bagian dari biaya layanan. Layanan harus dapat diakses, berkualitas tinggi, disampaikan dengan cepat, dan akurat. Akuntansi manajemen sektor publik dapat mengidentifikasi biaya apa saja yang perlu dicatat untuk menawarkan layanan kepada masyarakat umum dengan menggunakan berbagai pendekatan.

#### 6. Evaluasi Kinerja.

Dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang ditentukan dalam fungsi perencanaan, akuntansi manajemen sektor publik dapat mengevaluasi kinerja semua pegawai atau lembaga publik. Rasio keuangan, balanced scorecard, dan metode pengukuran lainnya digunakan.

### **Peran Akuntansi Manajemen *Good Governance***

Negara, dunia usaha, dan masyarakat madani dalam suatu bangsa merupakan tiga pilar utama yang mendukung tata pemerintahan yang baik sebagai suatu gagasan sebagai suatu sistem atau pola yang dapat diwujudkan. Suatu pemerintahan dengan kekuasaan negara yang menjalankan tata pemerintahan yang baik berpegang pada sejumlah prinsip panduan untuk memastikan bahwa organisasi berjalan secara efektif.

Penyelenggaraan negara yang teratur, kepentingan umum, kejelasan hukum, proporsionalitas, profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan hanyalah beberapa dari sekian banyak prinsip yang membentuk pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ada beberapa prinsip tata kelola yang baik yang dapat dipraktikkan secara efektif berkat fungsi akuntansi. Akuntansi sangat penting dalam konteks ini karena merupakan jenis sistem informasi yang membantu mencapai tujuan organisasi dengan menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

Fungsi akuntansi dalam membangun tata kelola yang baik sangat penting dalam organisasi sektor publik untuk membantu pengembangan akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta visi strategis. Hari ini, akuntansi berfungsi sebagai tujuan akhir dari setiap operasi bukan hanya menjadi alat untuk mencatat peristiwa ekonomi. Akuntansi publik dan swasta keduanya berkontribusi pada pemrosesan sumber daya dalam setiap unit ekonomi.

Pengembangan pengendalian internal, evaluasi akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang akurat dan transparan merupakan kontribusi yang dilakukan oleh akuntansi perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dihitung dan berhasil dicapai untuk setiap bisnis yang membutuhkan proses akuntansi. Gagasan tata pemerintahan yang baik mengacu pada pola atau pendekatan yang dapat dilaksanakan jika memiliki tiga pilar pendukung yang dapat bekerja sama secara efektif: negara, warga negara, dan sektor bisnis.

Gagasan good governance bukanlah hal baru dalam dunia akuntan publik, namun karena keuangan desa merupakan tingkatan pemerintahan paling bawah di Indonesia, maka belum banyak penelitian mengenai hal tersebut. Tanpa prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, otonomi daerah di tingkat desa tidak dapat dilaksanakan secara efektif atau bermanfaat bagi masyarakat. Dalam lembaga publik ini, fungsi akuntansi adalah membantu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, standar dan peraturan. Akuntansi memainkan peran penting dalam mencapai tata kelola yang baik di organisasi sektor publik dengan mendukung pengembangan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi serta visi strategis. Akuntansi adalah tujuan akhir dari semua kegiatan, bukan hanya cara mencatat proses ekonomi.

Tantangan yang terjadi dalam penerapan good governance dengan peran akuntansi tidak dapat dihindari. Tantangan-tantangan ini dapat mengganggu prosedur akuntansi yang sedang berlangsung dan memengaruhi kinerja yang dihasilkan. Untuk mengatasi hambatan dalam cara menempatkan proses akuntansi yang benar, hal ini perlu dioptimalkan dari berbagai perspektif.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memerangi kejahatan politik termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menghambat keadilan sosial dan kesetaraan. pengesahan UU No. 28 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengumpulkan informasi tentang pemerintah, termasuk, tentu saja, informasi keuangan. Pengambilan keputusan memiliki dua tujuan 1) berfungsi sebagai landasan bagi semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun kelompok, maupun secara kelembagaan dan organisasi. 2) Berfungsi sebagai kegiatan futuristik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masa depan (efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama).

Aktivitas untuk akuntansi manajemen sektor publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perencanaan dan pengendalian aktivitas. Aktivitas Karena ada tujuan perusahaan yang ingin dicapai seperti yang telah digariskan sebelumnya dalam kegiatan perencanaan. Gagasan good governance bukanlah hal baru dalam dunia akuntan publik, namun karena keuangan desa merupakan tingkatan pemerintahan paling bawah di Indonesia, maka belum banyak penelitian mengenai hal tersebut.

## Referensi :

Abdel-Basset, M., Gamal, A., Chakraborty, R. K., & Ryan, M. (2021). A new hybrid multi-criteria decision-making approach for location selection of sustainable offshore wind energy stations: A case study. *Journal of Cleaner Production*, 280, 124462. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124462>

- Alabdullah, T. T. Y., Ahmed, E. R., Almashhadani, M., Yousif, S. K., Almashhadani, H. A., Almashhadani, R., & Putri, E. (2021). How Significantly to Emerging Economies Benefit From Board Attributes and Risk Management in Enhancing Firm Profitability? *Journal of Accounting Science*, 5(2), 100–109. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1530>
- Astuty, W., & Pasaribu, F. (2021). The impact of business environment and organizational culture on the implementation of management accounting information system in some hotels. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6251–6262. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2433>
- Awan, U., Shamim, S., Khan, Z., Zia, N. U., Shariq, S. M., & Khan, M. N. (2021). Big data analytics capability and decision-making: The role of data-driven insight on circular economy performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 168, 120766. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120766>
- Coccia, M. (2021). How a good governance of institutions can reduce poverty and inequality in society? In *Legal-Economic Institutions, Entrepreneurship, and Management* (pp. 65–94). Springer. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-60978-8\\_4](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-60978-8_4)
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 384–397. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2040>
- Durana, P., Michalkova, L., Privara, A., Marousek, J., & Tumpach, M. (2021). Does the life cycle affect earnings management and bankruptcy? *Oeconomia Copernicana*, 12(2), 425–461. <https://doi.org/10.24136/oc.2021.015>
- Fakhimuddin, M., Khasanah, U., & Trimiyyati, R. (2021). Database management system in accounting: assessing the role of internet service communication of accounting system information. *Research Horizon*, 1(3), 100–105. <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.100-105>
- falih Chichan, H., & Alabdullah, T. T. Y. (2021). Does environmental management accounting matter in promoting sustainable development? A study in Iraq. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 110–122. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1543>
- Fischer, A., Smiesko, M., Sellner, M., & Lill, M. A. (2021). Decision making in structure-based drug discovery: visual inspection of docking results. *Journal of Medicinal Chemistry*, 64(5), 2489–2500. <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.0c02227>
- Gangopadhyay, P., Chawla, M., Dal Monte, O., & Chang, S. W. C. (2021). Prefrontal-amygdala circuits in social decision-making. *Nature Neuroscience*, 24(1), 5–18. <https://www.nature.com/articles/s41593-020-00738-9>
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation And Governance*. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- Kasy, M., & Abebe, R. (2021). Fairness, equality, and power in algorithmic decision-making. *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 576–586. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3442188.3445919>
- Lisa, O. (2021). Asimetri informasi dan manajemen laba: suatu tinjauan dalam hubungan keagenan. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*. <http://www.ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/RDOS/article/view/623>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and

- government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Mishra, R., Singh, R. K., & Koles, B. (2021). Consumer decision-making in Omnichannel retailing: Literature review and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 45(2), 147-174. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12617>
- Morgan, J., & Patomäki, H. (2021). Planetary good governance after the Paris Agreement: The case for a global greenhouse gas tax. *Journal of Environmental Management*, 292, 112753. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112753>
- Nguyen, C. V., Giang, L. T., Tran, A. N., & Do, H. T. (2021). Do good governance and public administration improve economic growth and poverty reduction? The case of Vietnam. *International Public Management Journal*, 24(1), 131-161. <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1592793>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-10-2018-0116/full/html>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* 2021, 1(1), 49-59. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111>
- Tang, M., & Liao, H. (2021). From conventional group decision making to large-scale group decision making: What are the challenges and how to meet them in big data era? A state-of-the-art survey. *Omega*, 100, 102141. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102141>
- Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Shari'ah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-03-2019-0089/full/html>
- Yami, M., Barletti, J. P., & Larson, A. M. (2021). Can multi-stakeholder forums influence good governance in communal forest management? Lessons from two case studies in Ethiopia. *International Forestry Review*, 23(1), 24-42. <https://doi.org/10.1505/146554821833466040>